**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan Komisi Pembimbing

Lembar Persetujuan Pembimbing Dan Penelaah

Lembar Pengesahan Panitia Penelitian Disertasi

Abstrak i

Abstract ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi vi

Daftar Tabel x

Daftar Gambar xii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah. 1

1.2. Fokus Penelitian 41

1.3. Rumusan Masalah 43

1.4. Tujuan Penelitian 44

1.5. Manfaat Penelitian 45

1.5.1. Manfaat Teoritis 45

1.5.2. Manfaat Praktis 46

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI 47

2.1. Kajian Teori 47

2.1.1. Teori Manajemen 47

2.1.1.1. Definisi Manajemen 47

2.1.1.2. Fungsi Manajemen 49

2.1.1.3. Pentingnya Manajemen 50

2.1.2. Teori Organisasi 52

2.1.2.1. Definisi Organisasi 52

2.1.2.2. Macam - Macam Organisasi dari Segi Tujuan. 57

2.1.3. Teori Pemerintahan. 58

2.1.3.1 Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan 58

2.1.3.2. Pemerintahan Daerah 63

2.1.4. Otonomi Daerah 65

2.1.4.1. Pengertian Desentralisasi dan Otonomi Daerah 66

2.1.4.2. Maksud dan Tujuan Otonomi Daerah 74

2.1.5. Desentralisasi Fiskal 77

2.1.6. Manajemen Keuangan Daerah. 100

 2.1.6.1 Fungsi Anggaran 104

 2.1.6.2. Anggaran Berbasis Kinerja 105

 2.1.6.3. Manajemen APBD 108

2.1.7. Kepemimpinan (Leadership) 113

 2.1.7.1. Kepemimpinan Stratejik 115

 2.1.7.2. Faktor-faktor Kepemimpinan Stratejik 122

 2.1.7.3. Dimensi Kepemimpinan Stratejik 126

2.1.8. Perilaku Birokrasi 128

 2.1.8.1. Definisi Perilaku Birokrasi 130

 2.1.8.2. Budaya Birokrasi 135

2.1.9. Teori Pembangunan 143

 2.1.9.1. Definisi Pembangunan 144

 2.1.9.2. Strategi Pembangunan Daerah di Era Otonomi 148

 2.1.9.3. Perencanaan Pembangunan Daerah 151

 2.1.9.4. Pembiayaan Pembangunan Daerah 154

2.1.10. Teori kesejahteraan. 155

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya Yang Relevan. 158

2.3. Kerangka Pemikiran 165

2.4. Proposisi Penelitian 184

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 185

3.1. Metode penelitian 185

3.2. Penelitian Metode Kualitatif pada Kasus Tertentu. 185

3.2.1. Metode penelitian Kualitatif 185

3.2.2. Metode Studi Kasus 187

3.2.3. Alasan Penggunaan Studi Kasus Tunggal 191

3.3. Desain Penelitian 194

3.3.1. Unit analisis 194

3.3.2. Keterkaitan data dengan proposisi 194

3.3.3. Kriteria interpretasi temuan 197

3.4. Kriteria Uji Kualitas Data penelitian 197

3.4.1. Validitas konstruk 197

3.4.2. Validitas Internal 198

3.4.3. Validitas Eksternal 198

3.4.4. Reliabilitas 198

3.5. Jenis dan Sumber Data 200

3.6. Teknik analisis 203

3.7. Jadwal Waktu penulisan Disertasi 204

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 206

4.1. Analisa Hasil Penelitian 206

4.1.1. Gambaran Umum Daerah 206

4.1.1.1. Kondisi Geografis Daerah 206

4.1.1.2. Gambaran Umum Demografis 208

4.1.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah 208

4.1.1.4. Potensi dan Masa Depan Daerah 211

4.1.2. Kondisi Eksisting Pemerintah Daerah 213

4.1.2.1. Perangkat Daerah 215

4.1.2.2. Kepala Daerah dan Birokrasi Daerah 222

4.1.2.3. Kebijakan Stratejik 226

4.1.2.3.1. Visi dan Misi 226

4.1.2.3.2. Arah Pembangunan 238

4.1.2.3.3. Program Prioritas 240

4.1.2.3.4. Strategi Pembangunan 242

4.1.2.4. Keuangan Daerah 244

4.1.2.5. Pembangunan Daerah 255

4.1.2.6. Kesejahteraan Rakyat 260

4.1.3. Interview Secara Terbuka 265

4.1.4 . Fokus Grup Diskusi (FGD) 270

4.1.5. Keterbatasan Penelitian 272

4.2. Pembahasan Hasil Proposisi Penelitian 277

4.2.1. Peranan Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal 279

4.2.2. Efektifitas Desentralisasi Fiskal untuk Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah 296

4.2.3. Membangun Daerah dengan Kapasitas Fiskal Daerah Terbatas 310

4.2.4. Upaya Memajukan dan Mensejahterakan Rakyat serta Mengukur Keberhasilannya 424

4.3. Expert Judgment 328

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI 344

5.1 . Simpulan 344

5.2 . Rekomendasi 352

DAFTAR PUSTAKA 356

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Korelasi antara indeks desentralisasi dengan kualitas pemerintahan 9

Tabel 1.2. Rasio Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Negara 15

Tabel 1.3. Rasio Total APBD Terhadap APBN Tahun 2015 17

Tabel 1.4. Indikator-Indikator Kunci Daerah Indonesia 1980-2013 26

Tabel 1.5 Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Se- Jawa Barat Tahun 2014(dalam jutaan rupiah) 29

Tabel 1.6 IPM (Metode Baru) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/ Kota 2014 32

Tabel 1.7 Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2008 dan 2015 37

Tabel 2.1 Peraturan Perundangan Terkait Manajemen Keuangan Daerah 111

Tabel 2.2 Struktur APBD 112

Tabel 2.3 Hasil Penelitian Sebelumnya Yang Relevan. 159

Tabel 3.1 Kaitan data dengan Proposisi 195

Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara 201

Tabel 3.3 Matriks Jadwal Kegiatan Penelitian Disertasi 204

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka 208

Tabel 4.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2011-2014 209

Tabel 4.3 Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 dan 2014 246

Tabel 4.4 Belanja Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2008 dan 2014 248

Tabel 4.5 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2013 dan 2014 249

Tabel 4.6 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2013 dan 2014 250

Tabel 4.7 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 252

Tabel 4.8 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 253

Tabel 4.9 Matriks SWOT Kabupaten Majalengka 257

Tabel 4.10 Pencapaian Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2015 262

Tabel 4.11 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Majalengka 264

Tabel 4.12 Jawaban Responden Atas Pertanyaan Proposisi 1 294

Tabel 4.13 Jawaban Responden Atas Pertanyaan Proposisi 2 309

Tabel 4.14 Jawaban Responden Atas Pertanyaan Proposisi 3 323

Tabel 4.15 Jawaban Responden Atas Pertanyaan Proposisi 4 327

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Piagam Penghargaan Kinerja Kesehatan Fiskal Dan Pengelolaan Keuangan 39

Gambar 2.1 Kepemimpinan Stratejik dan Proses Manajemen Stratejik 119

Gambar 2.2 Formula Perilaku Individu 133

Gambar 2.3 Model Perilaku Birokrasi 134

Gambar 2.4 Kumpulan Teori dan Hasil Penelitian yang Relevan 182

Gambar 2.5 Paradigma Penelitian 183

Gambar 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Majalengka 207

Gambar 4.2 Perekonomian Kabupaten Majalengka Tahun 2014 210

Gambar 4.3 Kerangka Pemikiran Penetapan Organisasi Perangkat Daerah 216

Gambar 4.4 Organisasi Perangkat Daerah 220

Gambar 4.5 Visi Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 231

Gambar 4.6 Misi Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 233

Gambar 4.7 Matriks SWOT Kabupaten Majalengka 259

Gambar 4.8 Interview dengan Wakil Bupati 266

Gambar 4.9 Interview dengan Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Komisi II 268

Gambar 4.10 Interview dengan Sekda 269

Gambar 4.11 Interview dengan BKD, Bappeda, DPKAD dan Inspektur Daerah 270

Gambar 4.12 Penyerahan Anugerah Dana RakÇa dan Konferensi Nasional Kementerian Keuangan RI 271

Gambar 4.13 Proses Penyelenggaraan Pemerintahan 284

Gambar 4.14 Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2014 286

Gambar 4.15 Menumbuhkan Peran Publik 288

Gambar 4.16 Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah 291

Gambar 4.17 Memelihara Sinergitas 293

Gambar 4.18 Membangun Ekonomi Keluarga 314

Gambar 4.19 Membangun Desa 318

Gambar 4.20 Membangun Kota 320

Gambar 4.21 Mengembangkan Usaha Unggulan 322

Gambar 4.22 Diskusi dengan Made Suwandi, Msoc.sc., Ph.D 328

Gambar 4.23 Diskusi dengan Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, MA 330

Gambar 4.24 Diskusi dengan Prof. Dr. Ir. H Sutarman, M.Sc 331

Gambar 4.25 Diskusi dengan H Aang Hamid Suganda, S.Sos 334

Gambar 4.26 Instrumen Kebijakan Fiskal 337

Gambar 4.27 Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal 341

Gambar 4.28 Kriteria dan Mekanisme Penilaian DID 343